

LAPORAN BULANAN

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950
email : ptun.jakarta@gmail.com | Telepon : (021) 22859672

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	13
BAB III. TELAAHAN	21
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	22

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



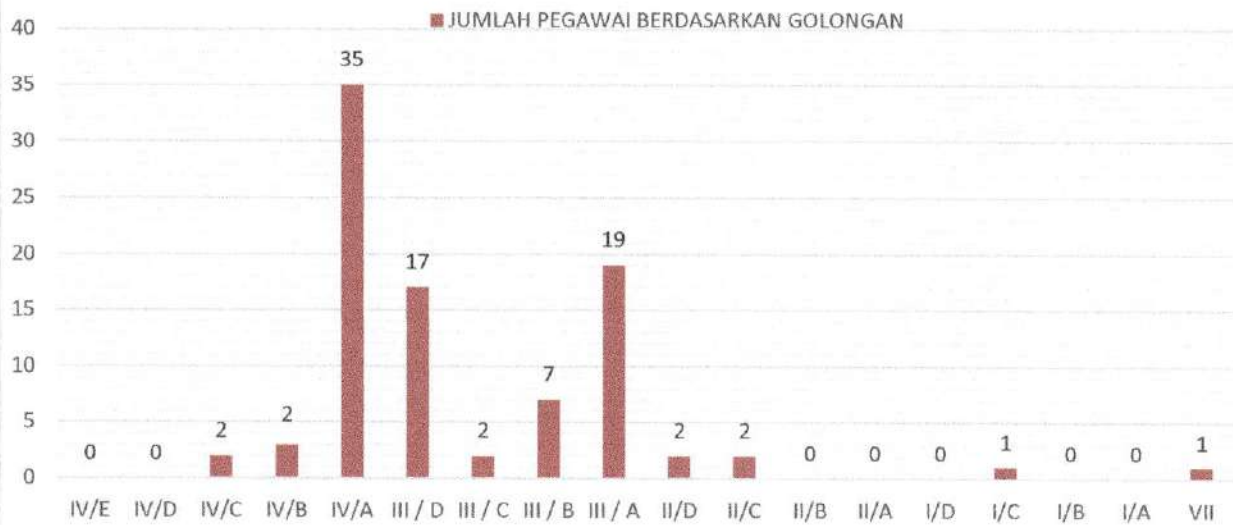
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2024 adalah 88 Orang, CPNS 2 Orang, PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 64 orang dan Perempuan 38 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Yarwan, SH, MH	Ketua PTUN Padang	Wakil Ketua PTUN Jakarta	TMT 21 Nopember 2024
2.	Gugum Surya Gumilar, SH, MH	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	TMT 01 Nopember 2024

Mutasi Keluar Wilayah

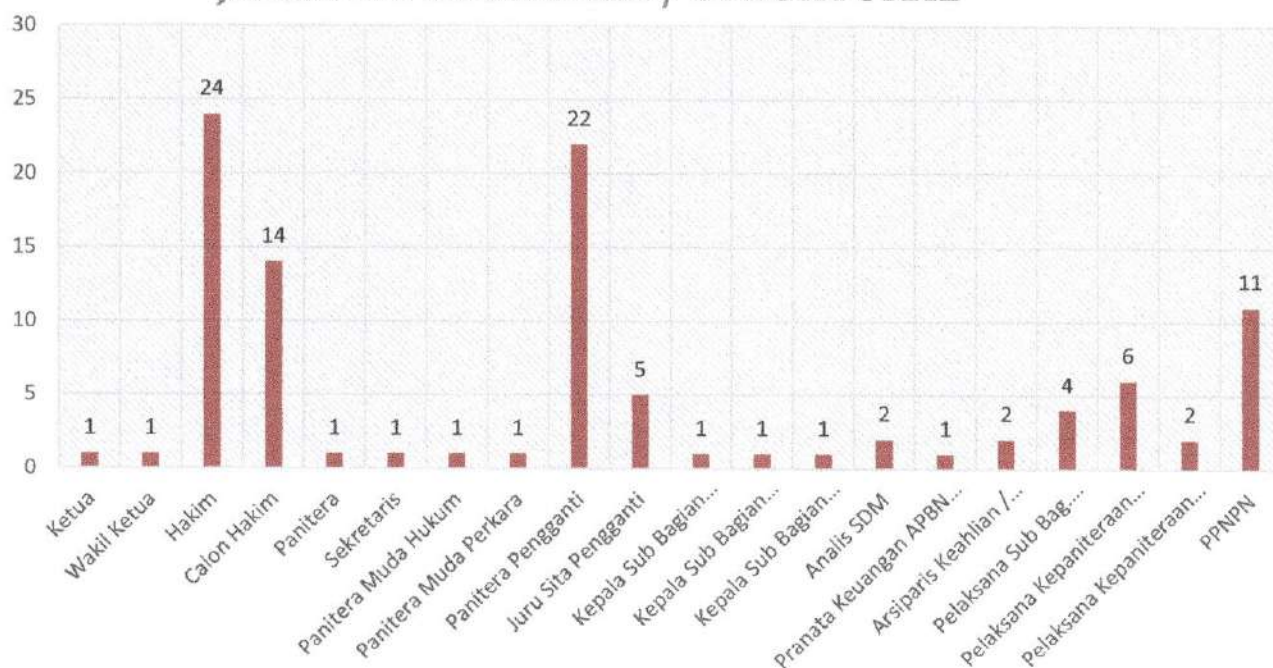
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Joko Setiono, SH, MH	Wakil Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi PTUN Mataram	TMT 13 Nopember 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

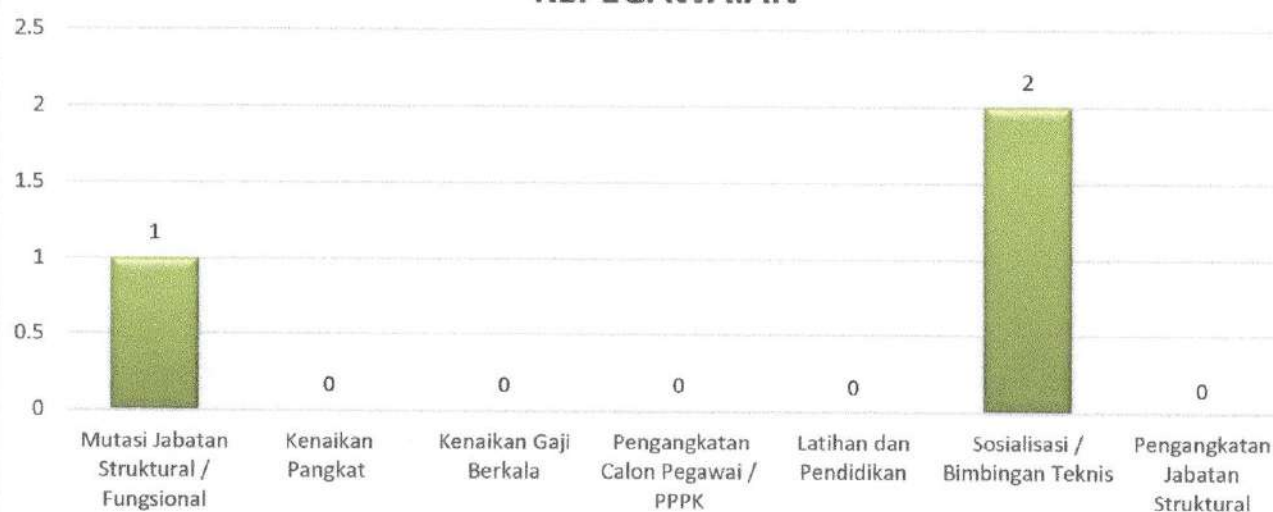
Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Yarwan, SH, MH	Ketua PTUN Padang	Wakil Ketua PTUN Jakarta	TMT 21 Nopember 2024

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	67	0	0	67
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	12	0	0	12
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	3	0	0	3
4	Kepaniteraan Muda Perkara	354	0	0	354
5	Kepaniteraan Muda hukum	26	0	0	26
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					462

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	0	62	0	62
2		PT.TUN-JAKARTA	0	0	0	0
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	0	0	0	0
4	PERSURATAN	DIRJEND.BADIMILTUN	0	0	0	0
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	42	0	0	42
7		UMUM/LAIN-LAIN	13	0	0	13
TOTAL					117	

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

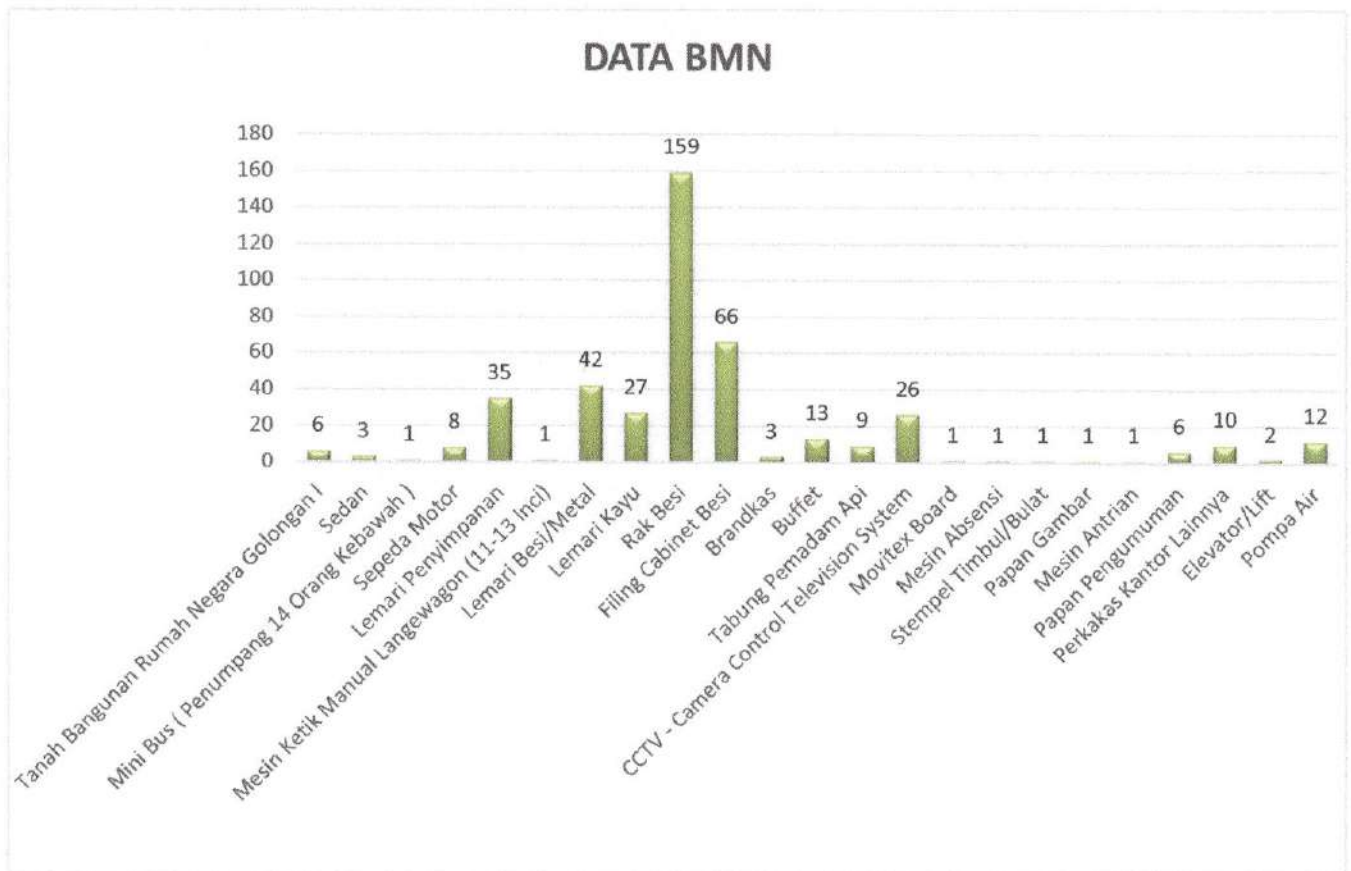
2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

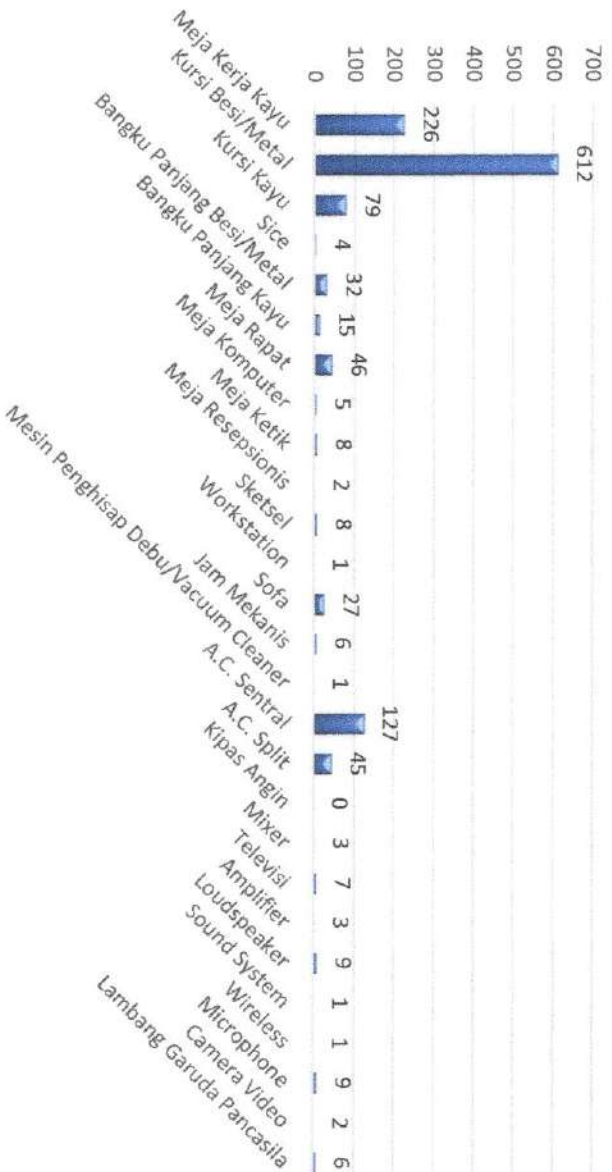
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan Nopember Tahun 2024 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

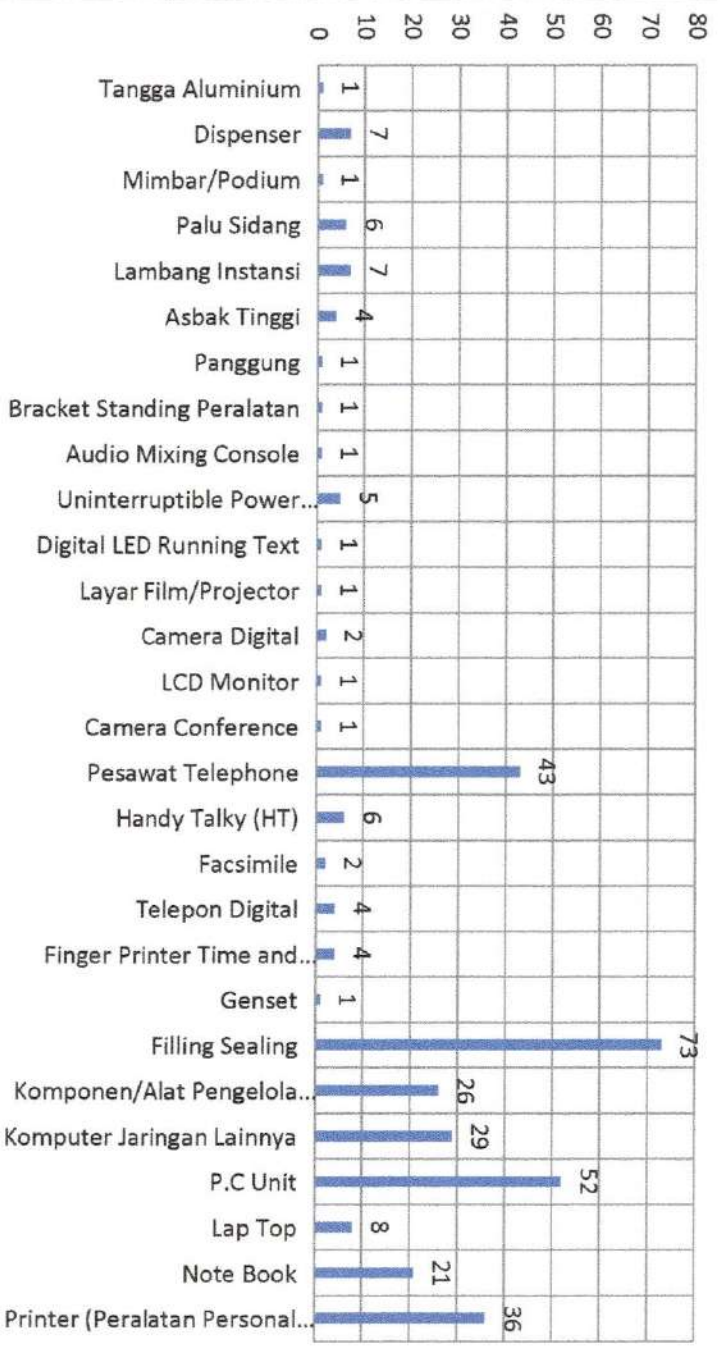


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

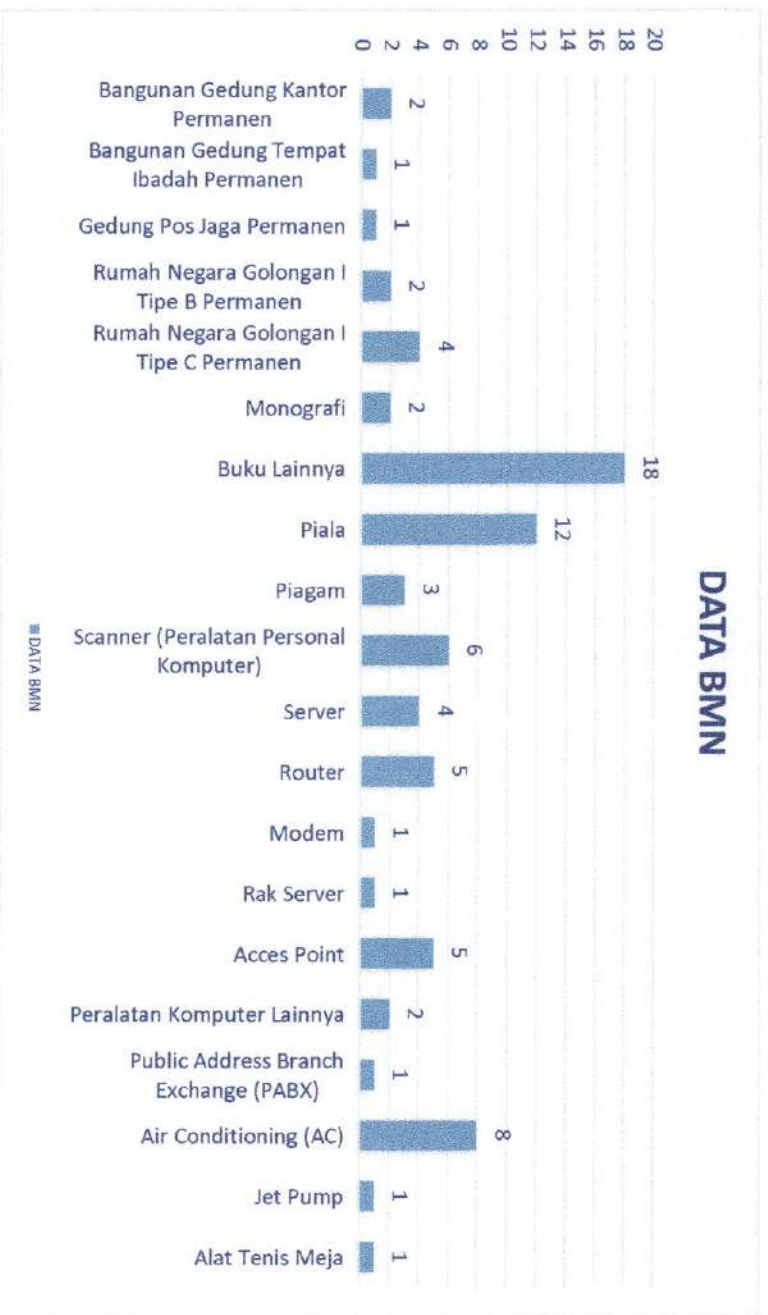
DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Nopember 2024 Perpustakaan Pengadlian Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN - NOVEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPOS : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 No. DIPA : DIPA-005.01.2.526732/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	% 6 = (5/4)	TOTAL	% 8 = (7/4)	TOTAL	% 10 = (9/4)	TOTAL	% 12 = (11/4)	
001	51	BELANJA PEGAWAI	13.935.205.000	12.128.856.148	87%	1.263.897.178	9%	13.392.753.326	96%	542.452.674	4%	
1066	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.043.216.000	4.621.322.760	92%	354.784.420	7%	4.975.107.180	99%	67.108.820	1%	
EBA.994	511119	Belanja Perbulanan Gaji PNS	63.000	57.617	91%	3.986	6%	61.615	98%	1.385	2%	
001A	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	375.819.000	342.616.558	91%	25.971.516	7%	368.588.074	98%	7.230.926	2%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	125.377.000	110.676.330	88%	8.387.294	7%	119.063.624	95%	6.313.376	5%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	37.440.000	87%	3.880.000	9%	40.320.000	93%	2.880.000	7%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.179.150.000	5.321.905.000	87%	741.545.000	12%	6.063.450.000	99%	65.700.000	1%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	874.004.000	764.837.507	88%	35.651.402	4%	800.488.909	92%	73.515.091	8%	
	511126	Belanja Tunj. Bersas PNS	762.525.000	239.130.840	31%	18.322.260	2%	257.453.100	33%	5.071.900	7%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	930.053.000	579.861.000	62%	67.285.000	7%	647.146.000	70%	282.907.000	30%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	89.654.000	67.055.000	75%	4.980.000	6%	67.035.000	75%	22.619.000	25%	
	521611	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.601.000	36.741.200	93%	2.858.800	7%	39.600.000	100%	1.000	0%	
	521619	Belanja Lembuhutan Gaji PPPK	7.000	876	12%	68	1%	944	16%	5.056	84%	
	521621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.704.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.704.000	100%	
	521622	Belanja Tunjangan Anak PNS/PPK	1.480.000	0	0%	0	0%	0	0%	1.480.000	100%	
	521624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	4.900.000	4.550.000	93%	350.000	7%	4.900.000	100%	0	0%	
	521625	Belanja Tunj. Bersas PPPK	4.054.000	941.450	23%	72.420	2%	1.013.870	25%	3.040.130	75%	
	521628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	6.720.000	80%	805.000	10%	7.525.000	90%	875.000	10%	
002	52	BELANJA BARANG	2.787.430.000	2.312.820.920	83%	399.494.521	7%	2.512.315.491	90%	275.114.509	10%	
	A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran										
1066	521111	Belanja Keperluan Kantor	726.284.000	614.548.000	85%	55.888.000	8%	670.416.000	92%	55.868.000	8%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	43.923.000	32.476.207	74%	2.656.449	6%	35.132.656	79%	14.790.344	30%	
EBA.994	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	66.000.000	41.837.887	63%	7.466.600	11%	49.304.487	75%	16.695.513	25%	
002A	B	Layanan Jasa dan Jasa										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	220.660.000	216.340.527	98%	0	0%	216.340.527	98%	4.319.473	2%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.640.000	1.584.200	60%	377.600	14%	1.961.800	74%	678.200	26%	
EBA.994	521115	Belanja Honor operasional Sertuan Kerja	74.662.000	60.172.000	81%	4.830.000	6%	65.002.000	87%	9.660.000	13%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	120.000	0	0%	0	0%	0	0%	120.000	100%	
	522113	Belanja Langganan Air	120.000	0	0%	0	0%	0	0%	120.000	100%	
	C	Pemeliharaan Kantor										
	525111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	301.023.000	234.297.500	78%	49.200.000	16%	283.497.500	94%	17.525.500	6%	
	525119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	45.000.000	44.333.400	99%	0	0%	44.333.400	99%	666.600	1%	
	525121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.908.000	246.494.549	85%	8.755.872	3%	255.250.421	88%	33.657.579	12%	
	D	Operasional Lainnya										
	521111	Belanja Keperluan Kantor	48.750.000	26.650.000	55%	22.100.000	45%	48.750.000	100%	0	0%	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	59.200.000	18.466.700	31%	9.180.000	16%	27.646.700	47%	31.553.300	53%	
	524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	150.000	0	0%	0	0%	0	0%	150.000	100%	
	522141	Belanja Sewa	903.960.000	775.620.000	86%	39.060.000	4%	814.680.000	90%	89.280.000	10%	
			16.722.686.000	14.441.677.118	86%	1.463.391.699	9%	15.905.068.817	95%	217.567.183	5%	

13 November 2024
 SEKRETARIS
 DIRI WALAHYU PTUNO, S.Kom.
 NP 1984024 202904 1 004

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : NOVEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
	52	BELANJA BARANG	63.660.000	42.677.000	67%	5.073.000	8%	47.750.000	75%	15.910.000	25%	
AEA.003.051A.52	521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	27.600.000	15.760.000	57%	1.840.000	7%	17.600.000	64%	10.000.000	36%	
QCA.001.051A.52	521211	Belanja Bahan (ATK dan Pengujian berkas perkara)	3.050.000	1.950.000	64%	0	0%	1.950.000	64%	1.110.000	36%	
QCA.001.051A.52	521211	Belanja Bahan (ATK Postakum)	4.200.000	3.367.000	80%	833.000	20%	4.200.000	100%	0	0%	
QBA.001.051A.52	522131	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Belanja Jasa Konsultan)	28.800.000	21.600.000	75%	2.400.000	8%	24.000.000	83%	4.800.000	17%	
			63.660.000	42.677.000	67%	5.073.000	8%	47.750.000	75%	15.910.000	25%	

Jakarta, 10 Desember 2024
 SEKRETARIS
 GIRI WAHYU UTOUMO, S.Kom.
 NIP.19840326 200904 1 004

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Oktober 2024 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara Professional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat No. 1 Tahun 2017 supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait Disiplin Pegawai agar berpedoman pada PP 94/2021, PP 11/2017, PERKA BKN 21/2010, 071/KMA/SK/V/2008;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Kasubag Kepegawaian dan Ortala untuk dapat memulai melakukan pembaharuan Surat Keputusan internal Ketua dengan melihat komposisi Hakim dan Pegawai terkini sehingga pada awal tahun 2025 semua program Ketua sudah dapat berjalan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan agar tiap bulan dibuatkan slip gaji bagi setiap Hakim dan Pegawai terkait potongan-potongan gaji yang ada sehingga adanya transparansi;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tahun depan dibuatkan pin Wiayah Bebas Korupsi (WBK) bagi setiap Hakim dan Pegawai, agar pada tahun 2025 pin tersebut dapat digunakan oleh seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan perihal tentang pembuatan SOP, agar segera dicek SOP yang belum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

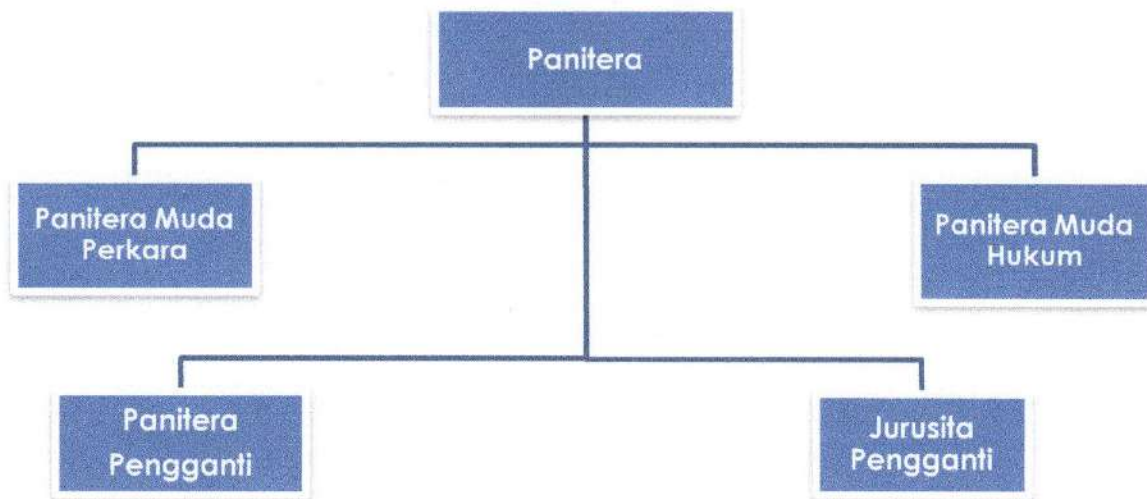
ada/dibuat, dan agar sebelum ditanda-tangani oleh Ketua, untuk direview terlebih dahulu oleh Team Review SOP;

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa poin yang menjadi catatan pada pembinaan yang dilakukan oleh **Bapak Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain yaitu
 - Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka harus dipersiapkan yel-yel selama 1 bulan ini, sehingga pada awal tahun 2025, setiap apel pagi dan sore wajib mengumandangkan yel-yel PTUN Jakarta dan juga pembacaan 8 (delapan) nilai Mahkamah Agung;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melanjutkan diskusi Reboan yang selama ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Memperhatikan masukan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan **Bapak Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.** untuk menindaklanjutinya dengan melihat keadaan kantor yang ada;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyoroti biaya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang menjadi perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), oleh karena itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Panitera untuk menyesuaikan Kembali SK Biaya Panjar Perkara dengan peraturan-peraturan yang terbaru.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

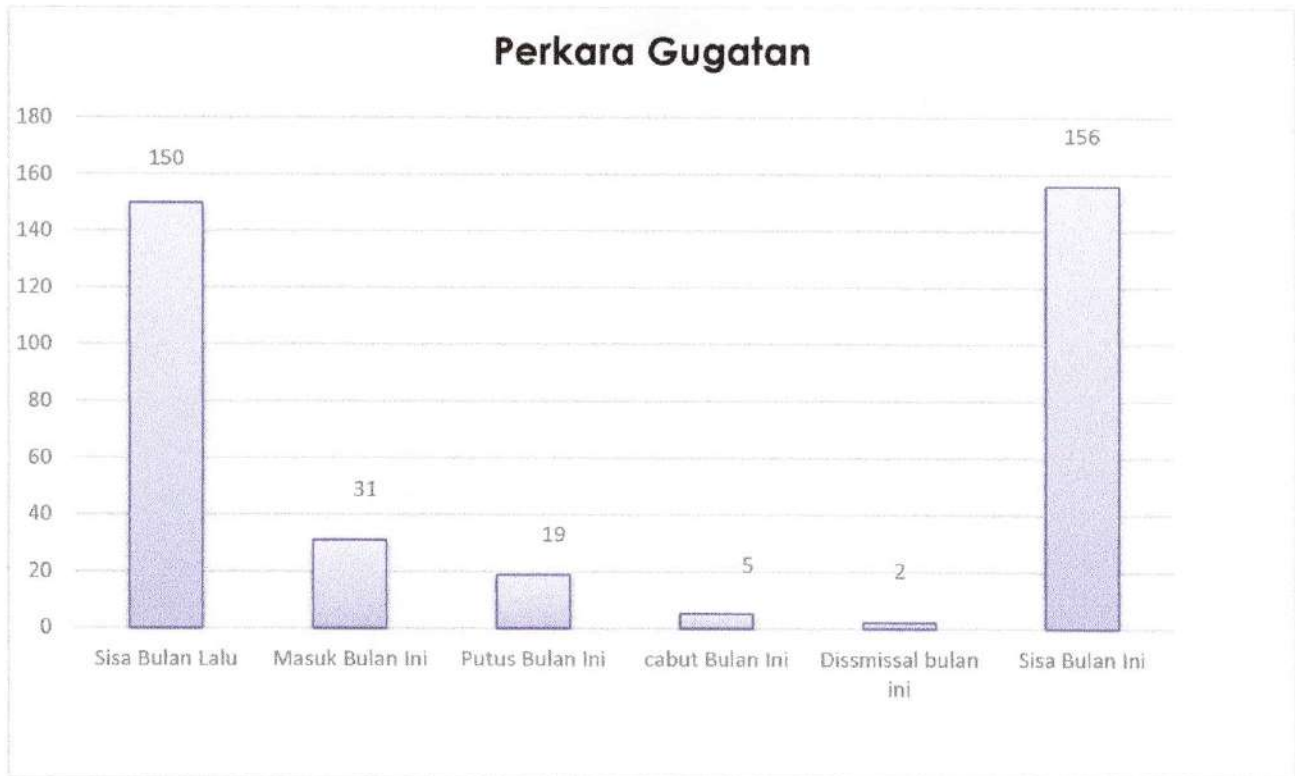
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyesuaian dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

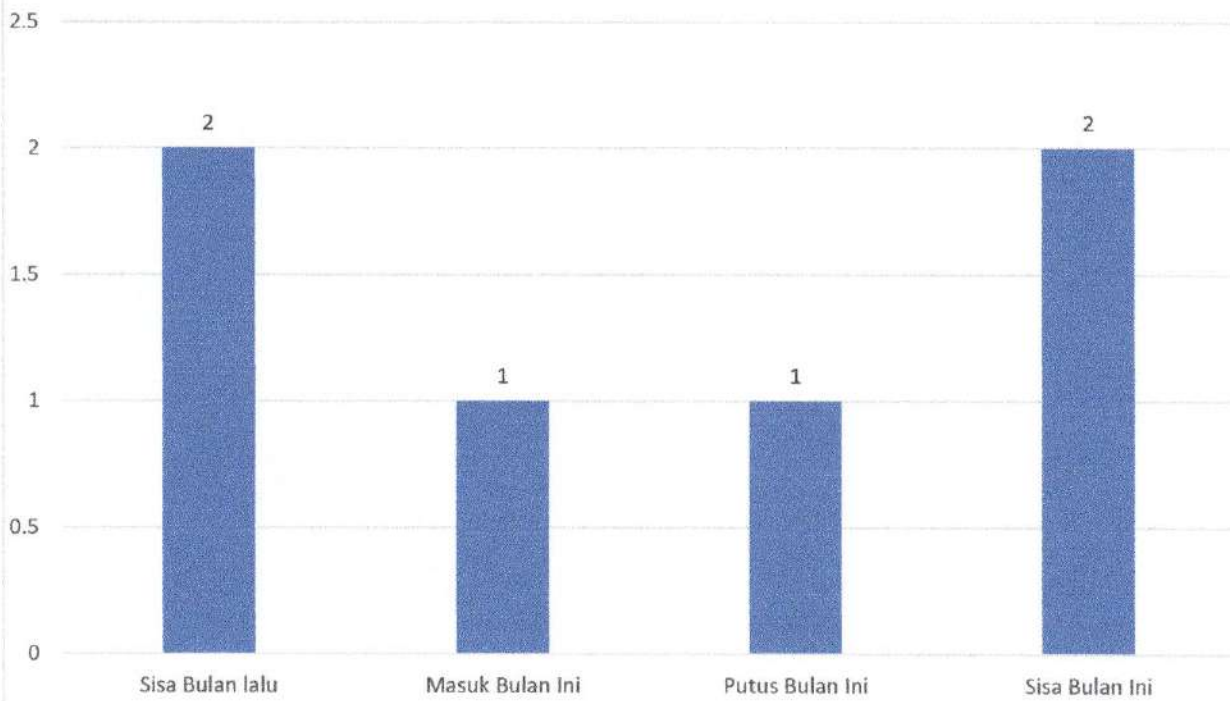
Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)
 $5 + 2 + 19 = 26$ Perkara

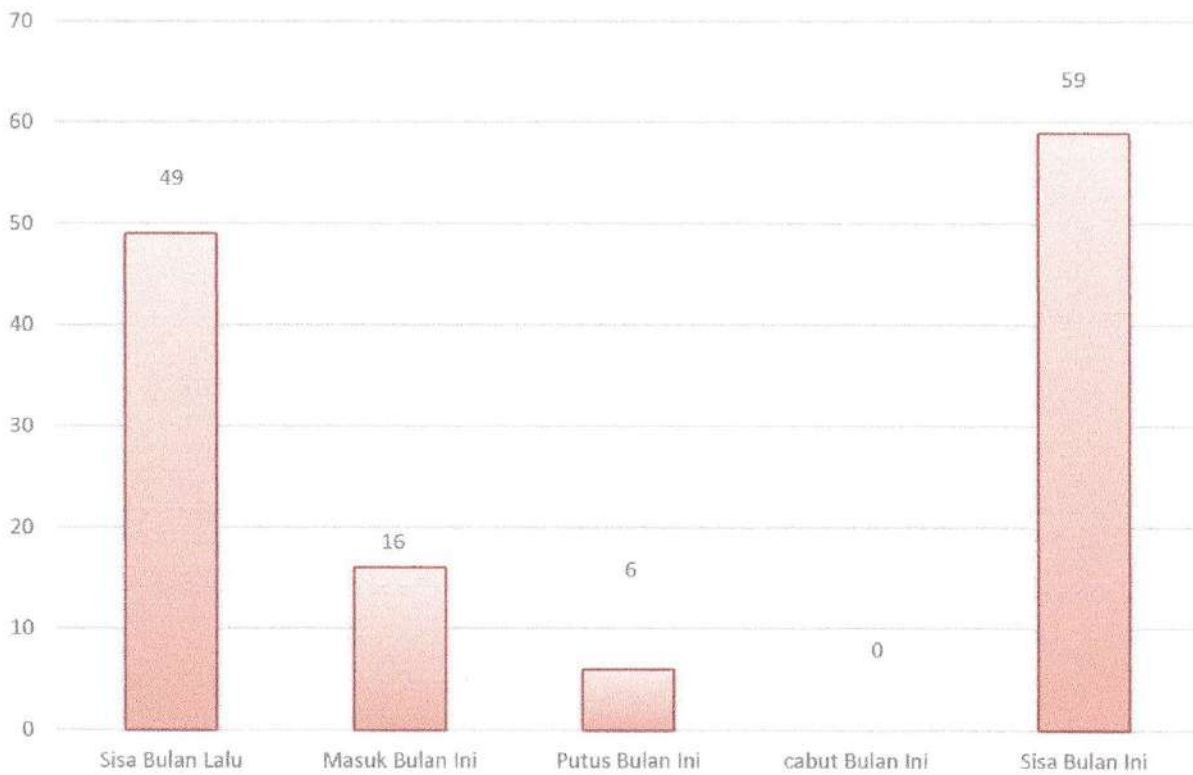
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

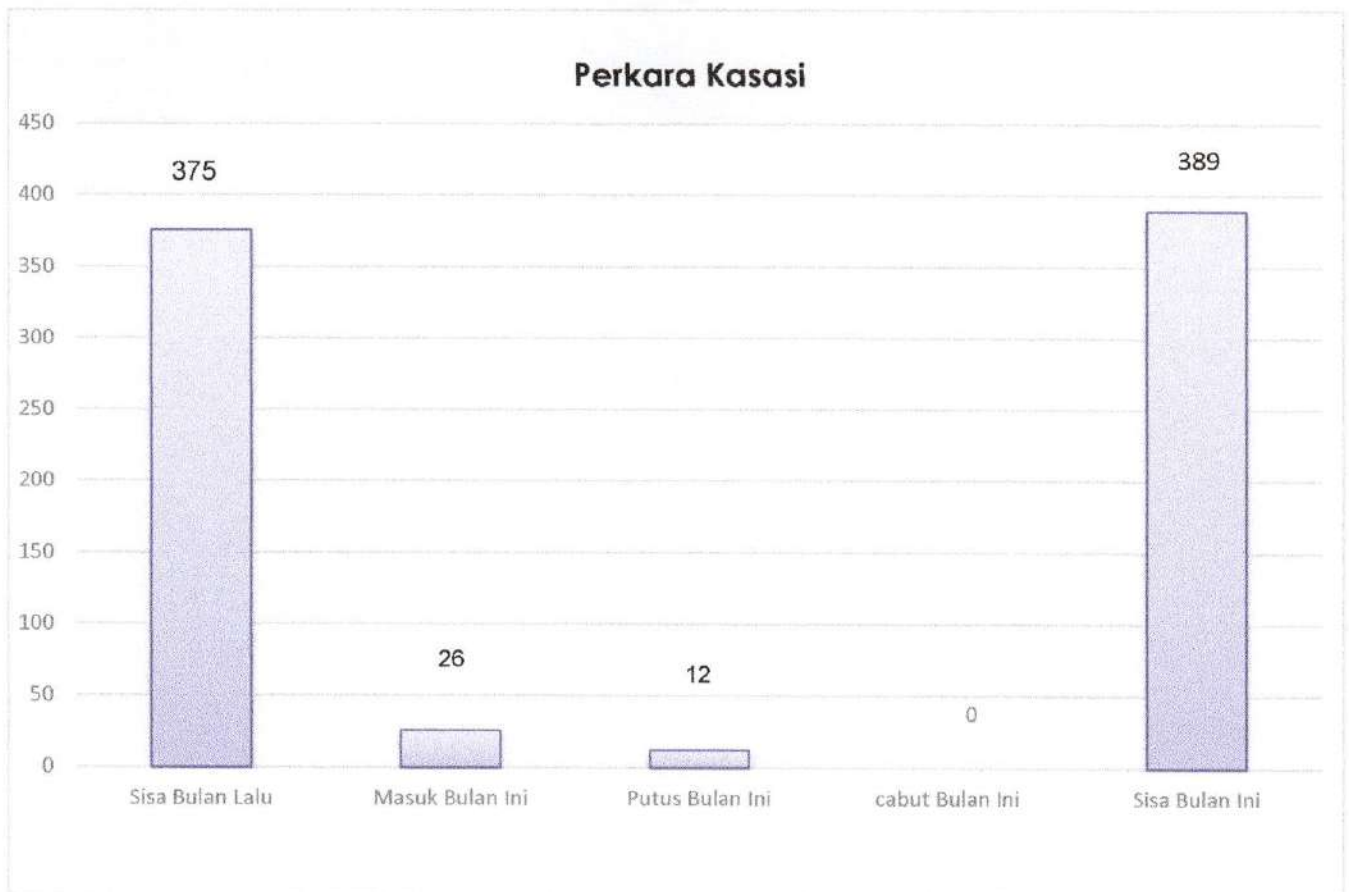


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan November 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara		Penggugat Jumlah	Penggugat Badan Hukum Provinsi	Pengugat Pajak	Pengugat Unerah	Perlawanan Densitas	Perlawanan Tidak Diterima	Perlawanan Dibatalkan	Perlawanan Gugur	Putusan		Sisa Perkara	Pemohonan				Tema	Berkas Perbaikan Berbanding	Keterangan				
			Masuk	Ditolak									Ditolak Diterima	Dibatalkan		Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan				Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan	Ditolak Dibatalkan
1	2																						28			
A GUGATAN																										
1	Pertanahan	14	4	-	18	4	-	-	4	-	-	-	-	2	-	2	16	3	3	-	1	-	1	1	(1 PRK MASUK PLW)	
2	Kepegawaian	5	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-		
3	Perijinan	23	10	-	33	-	10	10	-	-	-	-	-	1	-	2	30	3	4	2	-	1	1	-		
4	Lingkungan Hidup	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Hukum/ Parpol	28	6	1	33	4	2	6	-	1	-	-	-	1	1	3	30	1	2	-	-	-	1	-		
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Pengantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	8	1	-	9	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	2	7	-	3	-	-	-	1	-		
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	29	2	-	31	2	-	2	-	-	-	-	-	3	3	6	25	4	5	2	-	1	25	2		
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
18	Lain Lain	41	7	1	47	7	-	5	2	1	-	-	-	1	2	1	42	3	9	-	-	4	-	-		
JUMLAH		150	32	3	179	18	14	26	6	2	-	-	-	2	4	8	7	23	156	16	28	5	1	6	12	3



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan November 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 29 NOVEMBER 2024



C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024. Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Nomor : B-PP.00.00/10.18.2/MENPORA/X/2024. Upacara dilaksanakan pukul 07.30 WIB di Halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bertindak sebagai Pembina Upacara yaitu Ibu Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat struktural/Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan, seluruh ASN, PPPK dan PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

BAB III TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 88 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 5 (lima) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Nopember 2024 berjalan dengan lancar.

2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).
- Mohon agar diberikan Anggaran Belanja Modal untuk keperluan Pengadaan Scanner untuk Panitera Pengganti dan Kepaniteraan.

Jakarta, 11 Desember 2024





Mengetahui
Ketua,

Genoen Pratiwi, SH, MH
NIP. 197210261992032001

PLH Sekretaris,







Ika Salahuddin, S.E.
NIP. 197204112006041001

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		




Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		


Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak total• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					